PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT *(COMMUNITY DEVELOPMENT)* *OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN BESAR*

Ira Wahyuni Syarfi

Abstract: Its quiet evidence that there are conflicts between local people and the management of plantation companies who have responsibility to develop, or to assist, their economic live. The survey which was executed by 2003 found that there were two ways of the implementing program undertaken by the companies. First, the companies gave assistances which were not previously programmed but as those requested by the local communities. Second, the companies opened small-plantations to be organized by the people through PIR Program and provided them credit for buying seed. At whole, both ways of the implementing program have generated local communities-own plantation, fostered farmers' organization and business cooperation, increased local job opportunities and income, and opened remote areas. However, it was also found that the income improvement has incidentally created consumptiveness and social jealousy among people.

Kata Kunci: pembangunan masyarakat, perusahaan perkebunan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan perekonomian nasional akhir 1970-an memperlihatkan menurunnya penerimaan negara dari sektor migas sebagai konsekuensi dari turunnya harga minyak di pasar internasional. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah mendorong tumbuhnya sektor swasta untuk meningkatkan perolehan devisa dari sektor non migas. Salah satu diantaranya adalah dengan mendorong tumbuhnya sektor perkebunan.

Kehadiran perkebunan besar diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun demikian diperkirakan juga menimbulkan dampak lain seperti timbulnya konflik dan kecemburuan sosial. Untuk meminimalkan dampak sosial yang kurang menguntungkan tersebut, pemerintah telah mewajibkan kepada perusahaan besar secara umum untuk melakukan pembangunan masyarakat (*Community Development*) bagi masyarakat di sekitar wilayah kerjanya.

Dengan adanya pembangunan masyarakat diharapkan terjalin kerjasama antar masyarakat sekitar dengan perusahaan perkebunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah timbulnya kesenjangan sosial ekonomi yang tajam antara pengelola dan perkerja, sehingga konflik dapat dihindari.

Sungguhpun demikian, setelah lebih dari 20 tahun perkebunan besar yang diantaranya adalah di Sumatera Barat, masih terdengar beberapa konflik antara masyarakat sekitar perkebunan dengan pihak manajemen perusahaan. Konflik lebih banyak disebabkan oleh klaim kembali oleh masyarakat atas status kepemilikan dan penguasaan lahan perkebunan. Konflik ini mengganggu kinerja perusahaan dan juga ketertiban keamanan yang pada akhirnya menim-

Ira Wahyuni Syarfi adalah Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas

bulkan kerugian ekonomi bagi perusahaan maupun bagi masyarakat sekitar.

Untuk dapat mengenali masalah pembangunan masyarakat oleh perkebunan besar di Sumatera Barat, serta untuk mencari solusi pemecahan masalah dan model pembangunan masyarakat yang lebih baik di masa datang, maka perlu dilakukan kajian komprehensif tentang pelaksanaan pembangunan masyarakat yang telah ada selama ini dan dampaknya bagi masyarakat.

Perumusan Masalah

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa realita saat ini adalah perusahaan perkebunan telah melaksanakan kewajiban pembangunan masyarakat dengan mengeluarkan dana untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar, tetapi masyarakat belum merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, sehingga memunculkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya. Situasi ini menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan perusahaan maupun masyarakat, serta terganggunya perekonomian Sumatera Barat secara keseluruhan.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mempelajari pelaksanaan pembangunan masyarakat oleh perusahaan besar perkebunan di Sumatera Barat.
2. Mempelajari dampak pembangunan masyarakat oleh perusahaan besar perkebunan di Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Data dan informasi dikumpulkan dengan mengunakan metode survei. Unit kajian terbagi atas dua bagian yakni manajemen perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar perkebunan. Survey ditingkat perusahaan dilakukan untuk mendapatkan informasi pelaksanaan pengembangan masyarakat yang telah mereka lakukan kemudian data dan informasi tersebut di *cross check* dengan masyarakat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengambarkan seobjektif mungkin pelaksanaan pengembangan masyarakat yang sudah dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

Perusahaan Besar Perkebunan Swasta Nasional (PBSN) yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah: PT. SAK dan PT. BPSJ di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung untuk komoditi kelapa sawit dan karet, serta PT. I.S. di Kabupaten Agam untuk komoditi kakao, dan PT. M.K. di Kabupaten Solok Selatan untuk komoditi teh. Penelitian ini dilakukan tahun 2003.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembangunan Masyarakat (*Community Development*)

Luas kebun PT. SAK 2.402,15 hektar, yang terbagi atas kebun karet seluas 1.136,57 hektar dan kebun sawit seluas 1.265,58 hektar. Nagari yang ada di sekitar kebun adalah Nagari Sungai Limau. Pembangunan nagari sekitar oleh PT. SAK belum dilaksanakan secara terenana, yang ada hanya bantuan insidentil. Bantuan insidentil tersebut dilaksanakan jika ada usulan proposal dari masyarakat kepada perusahaan, selanjutnya perusahaan mempelajari kemungkinan untuk diwujudkan. PT. SAK telah memberikan sumbangan sebesar Rp. 2.000.000,- secara rutin untuk bantuan nagari.

Pola pembangunan PT. BPSJ adalah PIR anak angkat, yaitu: (a). Luas kebun inti adalah 4.709 hektar, (b). Luas kebun anak angkat adalah 8.089,87 hek-

tar, (c). ada tujuh KUD areal kebun plasma dan (d). Ada 10 nagari disekitar perkebunan tersebut.

PT. BPSJ sebagai kebun inti membantu membangun kebun masyarakat melalui kredit skim KKPA, yang kemudian disebut kebun anak angkat. Inti juga membina kelembagaan petani (kelompok dan koperasi petani) dan memberikan penyuluhan. Ini bentuk kegiatan pembangunan masyarkat PT. BPSJ untuk petani sekitar yang menjadi anak angkat. Pembangunan masyarakat pola anak angkat ini tidak jauh berbeda dengan pembangunan masyarakat oleh PTPN. VI yang berwujud pembangunan fisik, sosial organisasi dan ekonomi pengembangan usaha koperasi.

Program terencana untuk pembangunan masyarakat sekitar yang bukan anak angkat belum ada, kecuali bantuan insidentil yang diberikan oleh perusahaan jika ada usulan dari masyarakat kepada perusahaan, dengan terlebih dulu mempelajari kemungkinannya untuk diwujudkan. Sumbangan untuk nagari sekitar juga diberikan oleh perusahaan secara rutin sesuai dengan kesepakatan.

PT. M.K adalah perkebunan teh yang teletak di Nagari Lubuk Gadang dan Nagari Bangun Rejo Kabupaten Solok Selatan, dengan HGU seluas 2.025 hektar, tetapi yang dimanfaatkan sampai sekarang hanya sekitar 1.500 hektar. Kebun ini tanpa kebun plasma, dan telah berproduksi sejak tahun 1990. Belum ada program pemberdayaan ekonomi yang terprogram dari pihak perusahaan kepada masyarakat, yang ada hanya sumbangan insidentil, baik proposal yang diajukan masyarakat kepada perusahaan maupun bantuan spontan dalam bentuk pembangunan mesjid/musholla dan bantuan untuk memperingati hari besar nasional dan hari besar Islam.

PT. I.S. adalah perusahaan perkebunan untuk tanaman kakao, yang terletak di Nagari Padang Madani dan Nagari Sitanang Kabupaten Agam. Memiliki HGU seluas 1.494,25 hektar, tanpa kewajiban membangun kebun plasma. Proses pembersihan lahan dilakukan tahun 1987, dan mulai produksi tahun 1992. Produksi yang dihasilkan adalah biji kering terfermentasi baik dengan kadar air 7%, yang kemudian dipasarkan ke pasar lokal, Medan dan Jakarta. Sejauh ini belum ada program pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat sekitar secara terprogram yang dilakukan oleh pihak perusahaan, yang ada hanya bantuan tidak tetap untuk membangun mesjid/musholla dan untuk memperingati hari besar nasional, hari besar islam, kegiatan adat nagari, dan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa masyarakat sekitar PBSN telah dibantu secara insidentil oleh PBSN sesuai dengan kesanggupan perusahaan dan keinginan masyarakat. Bantuan tersebut untuk kebutuhan nagari, seperti perbaikan musholla, sekolah, sarana olahraga dan lain-lain.

Keinginan masyarakat untuk memiliki kebun sendiri sulit diwujudkan karena tidak ada kredit perkebunan untuk petani plasma atau anak angkat, kecuali dengan tingkat bunga komersial. Tabel 1 berikut memuat berbagai bentuk program pembangunan masyarakat yang pernah dibantu oleh PBSN, dan keinginan/kebutuhan masyarakat.

Dampak Pembangunan Masyarakat (*Community Development*)

Secara umum, masyarakat sekitar telah diuntungkan oleh adanya perkebunan besar dengan tersedianya infrastruktur, fasilitas informasi, kesempatan kerja, peningkatan unit usaha masyarakat, pengembangan organisasi, serta adanya alokasi dana untuk masyarakat sekitar.

Tabel.1 Kesesuaian antara Program Pembangunan Masyarakat oleh PBSN dengan Keinginan Masyarakat

Aspek	Program Pembangunan	Keinginan Masyarakat	Kesesuaian
Pembangunan Sosial	1. Bantuan dalam bentuk uang diberikan rutin dalam tiap bulan kepada wali jorong 2. Fasilitas kesehatan dan staf medis untuk perusahaan dan petani plasma. 3. Disesuaikan dengan usulan masyarakat dan ketersedian dana perusahaan	1. Klaim atas lahan kebun dan tanah pabrik, paksaan kepada perusahaan untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha 2. Pemaksaan kepada perusahaan untuk menerima tenaga kerja di sekitar kebun 3. Masyarakat nagari ingin mempunyai kebun plasma	Ada yang memberikan bantuan rutin berdasarkan usulan masyarakat, juga ada yang membangun kebun plasma setelah dituntut oleh masyarakat
Pembangunan Fisik	1. Perusahaan membangun prasarana dan membantu material dan alat-alat berat sesuai program anak angkat 2. Bantuan sesuai dengan permohonan masyarakat untuk memperbaiki jalan dan jembatan, sekolah, perbaikan mesjid, lapangan sepak bola dan *volly*	Perusahaan dapat membantu masyarakat sekitar untuk mempunyai kebun sendiri	Perusahaan mempertimbangkan usulan masyarakat sesuai kondisi dan kemampuan
Pembangunan Ekonomi	1. Bantuan rutin yang diberikan ke wali jorong, pembinaan teknis budidaya sawit 2. Adanya kerja sama inti plasma dalam membeli buah, membina koperasi 3. Adanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha disekitar kebun	1. Klaim masyarakat atas lahan inti dan pabrik 2. Memberikan kesempatan kerja untuk semua tenaga kerja daerah sekitar 3. Masyarakat ikut dalam usaha transportasi buah	Keinginan masyarakat sekitar disesuaikan dengan kemauan/kemampuan perusahaan.

Dampak positif bagi petani plasma di PTPN VI yaitu: (a) tumbuh dan berkembangnya kelompok tani mandiri sebagai pilar utama dari organisasi petani, (b) petani dengan kesadaran tinggi mau membiayai semua kegiatan kelompok dalam bentuk membayar biaya group manajemen dan kewajiban lainnya, (c) terjaminnya produktivitas tanaman pokok serta terjaminnya pendapatan petani (2-3 juta/ bln). Sedangkan dampak positif bagi masyarakat sekitar adalah: (a) tumbuhnya beberapa kelompok tani perkebunan di daerah sekitar, (b) adanya transfer keberhasilan PIR-Ophir ke masyarakat sekitar, (c) memfasilitasi petani kader koperasi lain untuk magang dan *study* banding tentang teknik pembinaan kelompok dan KUD, (d) terbukanya daerah yang terisolir informasi dan transportasi, dan (e) membuka peluang kerja.

Dampak negatif dari keberhasilan pembangunan perkebunan tersebut adalah: (a) petani plasma yang berhasil cenderung bersifat konsumtif, (b) adanya kecemburuan sosial dari penduduk yang hanya bekerja sebagai buruh, (c) penju-

alan hasil oleh petani ke pihak lain yang berakibat kredit macet, (d) masih ditemukannya sistem ijon, (e) adanya pengambilan keputusan yang tidak transparan, (f) terdapatnya lahan yang tidak dapat digarap PTP sesuai dengan HGU yang telah diperoleh karena klaim tanah oleh masyarakat.

Selanjutnya juga ditemukan dampak positif dan negatif dari pembangunan PBSN. Dampak positif terlihat dari: (a) terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, (b) terbukanya keterisoliran daerah, (c) peningkatan pendapatan dan standar hidup, (d) pembinaan teknis untuk petani plasma, (e) bantuan insidentil untuk masyarakat sekitar. Dampak negatif yang ditemui seperti: (a) tuntutan masyarakat sekitar akan kesempatan kerja, (b) pencurian hasil perkebunan, (c) pemasaran hasil ke luar perusahaan perkebunan besar, (d) kecemburuan sosial, (e) tidak adanya kepastian hukum pada saat terjadi klaim pemilikan tanah oleh petani untuk lahan inti atau pabrik.

Masalah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Masyarakat

Masalah pelaksanaan pembangunan masyarakat bagi masyarakat lebih tepat disebut sebagai masalah hubungan kerja antara pihak inti dan plasma, seperti: (a) keragaman latar belakang petani, (b) pemahaman anggota terhadap fungsi dan tujuan penumbuhan koperasi belum sesuai dengan prinsip koperasi, (c) kurang transparan dalam pengambilan keputusan (d) pola pikir bahwa kemandirian petani akan menghambat kelangsungan produksi dan proses pengembalian kredit (d) perbedaan persepsi antar instansi pembina dalam menjabarkan konsep pembinaan dan penumbuhan organisasi, serta (e) asuransi peremajaan kebun plasma belum mampu menutupi biaya *replanting*.

PENUTUP

Kesimpulan

Terdapat dua pola dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat oleh perkebunan besar, yaitu: (a) perusahaan perkebunan telah memberikan bantuan yang tidak terprogram/bersifat kedermawanan baik bersifat rutin maupun tidak rutin (b) perusahaan perkebunan membangun kebun untuk masyarakat sekitar melalui Pola PIR, anak angkat dan kredit bibit.

Dampak positif pembangunan masyarakat yaitu: adanya kebun plasma, pengembangan kelembagaan petani, usaha koperasi, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, terbukanya kawasan terisolir dan hubungan antar suku dan komunitas.

Dampak negatif bagi petani plasma adalah muncul sifat komsumtif dan ketergesaan mendapatkan dana tunai, timbul kecemburuan sosial, timbulnya klaim masyarakat atas lahan inti yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan.

Kendala dan masalah pembangunan masyarakat oleh perusahaan perkebunan adalah: perusahaan perkebunan belum bisa membangun kebun sesuai lahan yang dicadangkan untuk masyarakat, kecemburuan masyarakat yang hanya sebagai buruh, kecenderungan masyarakat yang mewajibkan perusahaan memberikan bantuan nagari yang terkadang diluar kemampuan perusahaan (d) penjualan hasil produksi perkebunan plasma tidak selalu kepada perusaahan inti dan adanya kredit macet dari petani plasma.

Saran

Karena belum ada peraturan yang mewajibkan perusahaan perkebunan besar melakukan program pembangunan masyarakat, tetapi ada keputusan Menteri Pertanian yang mengharuskan perusahaan perkebunan mengikut sertakan masyarakat petani pekebun serta adanya keinginan masyarakat sekitar perkebunan untuk memiliki kebun di atas tanah yang telah dirancangkan untuk HGU perusahaan, maka di masa datang Pemerintah dapat mewajibkan perusahaan perkebunan bermitra dengan koperasi petani untuk membangun kebun, sehingga terjadi proses pemberdayaan masyarakat.

Hubungan kemitraan antara kebun inti dengan kebun plasma dan anak angkat, sebaiknya diperkuat dengan semangat kesetaraan untuk memelihara kondisi kebun produksi, peningkatan kualitas produksi dan pengembangan pasar produksi serta pengelolaan hasil kebun. Sehingga terbangun rasa saling percaya dan saling menguntungkan.

Bantuan insidentil dan tidak terprogram yang telah dilakukan sebaiknya ditingkatkan menjadi bantuan terprogram untuk peningkatan mutu SDM masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Otzen, Uwe. 2003. "Community Development, The Key to Reducing Poverty in Africa's Rural Region." *Agriculture Rural Development*, Vol. 10.

Pemda Sumatera Barat. 1990. Keterkaitan Bapak Angkat Anak Angkat.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1977. *Perencanaan Pembangunan*. Aksara Baru. Jakarta.

William, N. Dunn. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.